



KECAMATAN KIARACONDONG





Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiararacondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*. Melalui Keputusan Menteri ini, pemerintah berusaha mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa *Laporan Kinerja*



Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya LKIP harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini, semoga apa yang disusun dalam laporan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 04 Januari 2019

Camat Kiararacondong



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
B Aspek Strategis Organisasi.....	5
C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	7
D Struktur Organisasi.....	10
E Sistematika Penyajian.	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A Rencana Strategis 2013 - 2018.....	14
1. Pernyataan Visi.....	16
2. Pernyataan Misi.....	17
3. Tujuan.....	17
4. Sasaran Strategis.....	17
5. Sasaran Program.....	18
6. Indikator Kinerja Utama.....	19
7. Program dan Kegiatan.....	23
B Perjanjian Kinerja 2018.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A Capaian Kinerja.....	29
B Analisis Capaian Kinerja.....	36
Sasaran Strategis.....	36
Sasaran Program.....	67
C Realisasi Keuangan.....	71



BAB IV	PENUTUP.....	75
	A Simpulan Umum.....	75
	B Simpulan Capaian Kinerja.....	76
	C Rencana Tindak.....	76



DAFTAR TABEL

1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	11
2.1	Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung.....	19
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung.....	21
2.3	Program dan Kegiatan Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung.....	23
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kiaracundang.....	28
3.1	Rencana Program Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung.....	32
3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.....	45
3.3	Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kiaracundang Tahun 2018.....	46
3.4	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracundang Tahun 2018.....	73



DAFTAR GRAFIK

3.1.1	Perbandingan IKM Tahun 2017 dengan Tahun 2018.....	39
3.1.2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018.....	46

PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**
- B. Aspek Strategis Organisasi**
- C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**
- D. Struktur Organisasi**
- E. Sistematika Penyajian**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dan perjuangan untuk melakukan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Ketetapan MPRS dan MPR RI Berdasarkan Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan.

Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Kemudian didalam penjelasan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud, dijelaskan bahwa asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Kiaracondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014



tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016, tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*. Melalui Keputusan Menteri ini, pemerintah berusaha mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (LAKIP). LAKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya LAKIP harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kiaracondong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiaracondong



Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD) pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Kiaracondong mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi:

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:



1. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan

Menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.



B. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana disebutkan bahwa Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Babakan Sari
2. Kelurahan Babakan Surabaya
3. Kelurahan Cicaheum
4. Kelurahan Kebon Jayanti
5. Kelurahan Kebon Kangkung
6. Kelurahan Sukapura

Kecamatan Kiaracondong terletak di wilayah tengah Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 6°56'30" (6,941237°) Lintang Selatan dan 107°37'30" (107,596611°) Bujur Timur. Secara topografi Kecamatan Kiaracondong terletak di ketinggian + 681 m dpl. Iklim Kecamatan Kiaracondong identik dengan iklim Kota Bandung yang dipengaruhi batas pegunungan di sekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Suhu maksimum/minimum rata-rata yaitu 18-25°C. Curah hujan rata-rata mencapai 2.400 Mm/Thn.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kecamatan Kiaracondong sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cibeunying Kidul
- Sebelah Timur : Kecamatan Antapani



- Sebelah Selatan : Kecamatan Buah Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Batununggal

Kecamatan Kiaracondong meliputi luas wilayah 613,03 Ha, berdasarkan luas wilayahnya Kelurahan Sukapura merupakan Kelurahan terluas yakni mencapai 280,0 Ha atau sebesar 45,67 % dari total luas wilayah Kecamatan Kiaracondong. Sementara Kelurahan Kebon Jayanti merupakan Kelurahan terkecil dengan wilayah 27,0 Ha atau sebesar 4,40 % total luas wilayah Kecamatan Kiaracondong. Untuk kepentingan administrasi kependudukan Kecamatan Kiaracondong dibantu oleh 85 Rukun Warga dengan 593 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kiaracondong terdiri dari pemukiman/pekarangan. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan, pendidikan dan perkantoran.

Penduduk Kecamatan Kiaracondong pada semester IV tahun 2018 berjumlah 131.457 jiwa, dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka jumlah perempuannya mencapai 65.224 jiwa (49,62%) dan penduduk berjenis kelamin laki-laki 66.233 jiwa (50,38%).



C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2018 terdiri dari :

I. Belanja Langsung Urusan

a. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

1. Kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2. Kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5. Kegiatan fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan
6. Kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
7. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

b. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

1. Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW
2. Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK
3. Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna
4. Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM



II. Belanja Langsung Penunjang Urusan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
13. Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

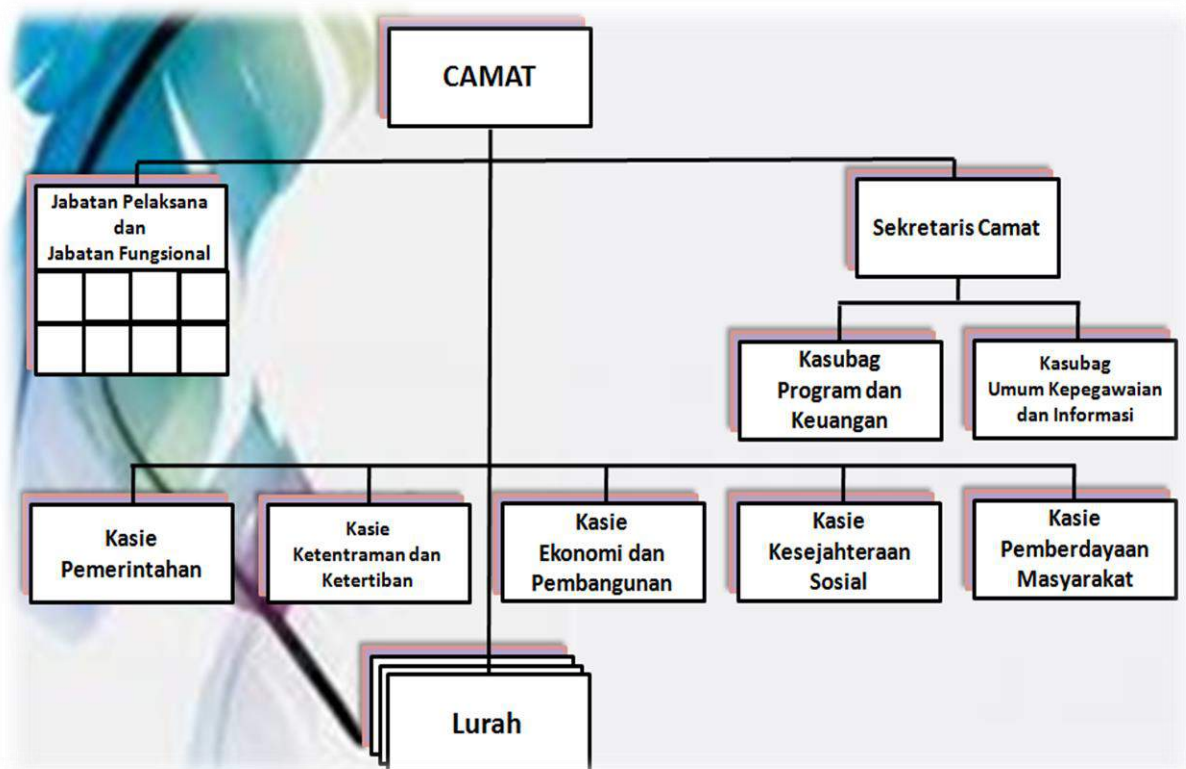
1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Kiaracondong terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional

Gambar 1.1
Bagan struktur organisasi Kecamatan





Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Kiaracundang	-	2	9	1	3	-	-	15
2	Kelurahan Babakan Sari	-	-	3	-	1	-	1	5
3	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	2	1	2	-	-	5
4	Kelurahan Cicaheum	-	1	3	-	1	1	-	6
5	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	3	-	3	-	1	7
6	Kelurahan Kebon Kangkung	-	-	2	-	3	-	-	5
7	Kelurahan Sukapura	-	-	3	-	2	1	-	6
JUMLAH		-	3	25	2	15	2	2	49
%		-	6,1	51,0	4,1	30,6	4,1	4,1	100,0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracundang Tahun 2018



E. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kiaracondong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018 :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2013-2018
 - 1. Pernyataan Visi
 - 2. Pernyataan Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran Strategis
 - 5. Sasaran Program
 - 6. Indikator Kinerja Utama
 - 7. Program dan Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja 2018



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
 - Sasaran Strategis
 - Sasaran Program
- C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Simpulan Capaian Kinerja
- C. Rencana Tindak

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013 -2018

- 1. Pernyataan Visi**
- 2. Pernyataan Misi**
- 3. Tujuan**
- 4. Sasaran Strategis**
- 5. Sasaran Program**
- 6. Indikator Kinerja Utama**
- 7. Program dan Kegiatan**

B. Perjanjian Kinerja 2018



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Kiararacondong didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bandung dan Camat Kiararacondong Kota Bandung dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

A. Rencana Strategis 2013 - 2018

Rencana Strategis Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Kiararacondong Kota



Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Pernyataan Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh warga Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kota Bandung yaitu :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” .

- **Unggul**

Adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota.

- **Nyaman**

Terciptanya suatu kondisi di mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsive terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya.

- **Sejahtera**

Yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat mengfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan



keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga jiwa dan batiniah.

2. Pernyataan Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar atau alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung merumuskan 2(dua) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan publik prima
- b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kiararacondong yang Profesional

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kiararacondong adalah :

“ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kiararacondong “

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,



terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Tabel 2.1

Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Kiaracundang Nomor : 08/VI-Kec.Kircon tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Bersamaan dengan Reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.



Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan yang tertuang pada SK IKU Kecamatan Kiaracondong nomor 138/02a - Kec.Kircon Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau KPI (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2018 :



Tabel 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai amanat UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 19/2008 tentang Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan.	Indikator penilaian IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Kecamatan Kiaracondong	Responden adalah penerima pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah Kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan Kecamatan.
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Menjadi IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta tercantum dalam Road Map/Rencana Aksi Walikota Bandung.	% Rata rata RW Juara + Siskamling Aktif dan LKK Aktif	Kecamatan Kiaracondong	A. (\sum RW yang memenuhi kriteria juara dibagi jumlah seluruh RW) x 100% 1. Jumlah RW yang mengelola minimal 1 metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat dibagi Jumlah RW Se-Kecamatan 2. Jumlah RW yang memenuhi minimal 5



Kecamatan Kiaracondong

							<p>dari 21 kondisi RW Juara dibagi Jumlah RW Se- Kecamatan</p> <p>B. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan dikali 100%</p> <p>C. Jumlah RW Siskamling aktif/ Jumlah RW se Kecamatan X 100 % (5 Kriteria Siskamling Aktif)</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



7. Program dan Kegiatan

Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2018 melaksanakan 5 (lima) Program dengan 28 (*dua puluh delapan*) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Program dan Kegiatan Kecamatan Kiararacondong
Kota Bandung**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
A.	Belanja Langsung Penunjang Urusan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor4. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor8. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah12. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran13. Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
B.	Belanja Langsung Urusan
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 7. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 3. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 4. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM



B. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Program-program pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Kota Bandung berdasarkan atas hal tersebut maka ditetapkan 2 (dua) program pembangunan pada Pemerintah Kota Bandung yang menjadi urusan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan



Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1(satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melaksanakan 1(satu) program (Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 85.

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1(satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “*Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*”. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 80%. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melaksanakan 1(satu) program (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan).

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melaksanakan 3 (tiga) program fungsi penunjang lainnya yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Penetapan atau Perjanjian Kinerja pada Kecamatan Kiaracondong merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta target yang dapat di sajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Kiaracondong

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD	TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	
						RPJMD	RENSTRA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	85	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	85	85
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	<i>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	80 %	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	<i>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	80 %	80 %

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja**
- B. Analisis capaian Kinerja**
 - Sasaran Strategis**
 - Sasaran Program**
- C. Realisasi Keuangan**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiararacondong Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung dan dituangkan dalam keputusan Camat Kiararacondong Nomor : 08/VI-Kec.Kircon tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2014-2018, yang mana Perjanjian kinerja tersebut direviu dan dituangkan dalam Keputusan Camat Kiararacondong Nomor 138/02a - Kec.Kircon tanggal 07 Februari 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung hasil Reviu Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Pada IKU sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik . Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik



terdapat 9 (sembilan) nilai unsur pelayanan yang menjadi indikator penilaian di masing-masing wilayah, diantaranya sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator berdasarkan Renstra reuiu tahun 2018 dimana sasaran strategis utama Meningkatnya pemberdayaan masyarakat. Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

- a) Persentase RW Juara
- b) Siskamling Aktif
- c) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung di Tahun Anggaran 2018 melaksanakan tujuan, sasaran yang ditunjang oleh 5 (*lima*) Program dengan 28 (*dua puluh delapan*) kegiatan seperti dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 3.1

**Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2018										Prakiraan Maju Tahun 2019		PERANG KAT DAERAH Penanggung Jawab			
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
4.05	26	28		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong	Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	85	85	8.530.249.162	8.530.249.162	-	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung		Kasie Kecamatan dan Kelurahan
4.05	26	28	01	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan perekonomian masyarakat	Jumlah laporan kegiatan perekonomian masyarakat					12 laporan	12 laporan	64.215.200	64.215.200	-			12 laporan	
			02	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat					12 laporan	12 laporan	1.158.150.000	1.158.150.000	-			12 laporan	
			03	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan infrastruktur dan lingkungan hidup	Jumlah laporan kegiatan infrastruktur dan lingkungan hidup					12 laporan	12 laporan	3.264.249.858	3.264.249.858	-			12 laporan	
			04	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban					12 laporan	12 laporan	665.007.440	665.007.440	-			12 laporan	
			05	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemerintahan umum	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemerintahan umum					12 laporan	12 laporan	2.942.329.509	2.942.329.509	-			12 laporan	
			06	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat					12 laporan	12 laporan	51.107.000	51.107.000	-			12 laporan	
			07	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat					12 laporan	12 laporan	385.190.155	385.190.155	-			12 laporan	



Kecamatan Kiaracondong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018														Prakiraan Maju Tahun 2019		PERANG KAT DAERAH Penanggung Jawab	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
4.05	26	22	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan	Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong	Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	80 %	80 %	7.785.104.834	7.785.104.834	-	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 %	10.286.119.708	Kasie Kelurahan
		01	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW					255 sub kegiatan	255 sub kegiatan	6.357.639.484	6.357.639.484	-			340 sub kegiatan	8.500.230.683	
		02	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK					24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	395.787.750	395.787.750	-			24 sub kegiatan	599.699.836	
		03	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna					24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	577.389.000	577.389.000	-			30 sub kegiatan	597.788.566	
		04	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM					18 sub kegiatan	18 sub kegiatan	454.288.600	454.288.600	-			18 sub kegiatan	588.400.623	
4.05	26	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	OPD Kecamatan Kiaracondong	OPD Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	2.420.770.027	2.368.655.277	52.114.750	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	2.092.253.373	Sub Bag Kecamatan dan Sekrt Kelurahan
		02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik					12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	308.834.974	308.834.974	-			12 laporan	220.904.679	
		06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit jasa perijinan kendaraan yang dikelola	Jumlah unit jasa perijinan kendaraan yang dikelola					76 unit	76 unit	19.321.930	19.321.930	-			75 unit	26.949.770	
		08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan					12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	347.047.400	347.047.400	-			12 jasa bulanan	137.764.370	
		09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja					59 unit	59 unit	26.828.000	26.828.000	-			63 unit	30.661.130	
		10	Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket penyediaan ATK	Jumlah paket penyediaan ATK					6 paket	6 paket	111.368.181	111.368.181	-			4 laporan	108.161.245	
		11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan					80 jenis	80 jenis	163.252.538	163.252.538	-			4 laporan	135.079.180	
		12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan					34 jenis	34 jenis	23.503.254	23.503.254	-			4 laporan	18.431.314	
		14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga					94 jenis	94 jenis	23.895.000	23.895.000	-			4 laporan	27.275.000	



Kecamatan Kiaracondong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018														Prakiraan Maju Tahun 2019		PERANG KAT DAERAH Penanggung Jawab	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jumlah jenis bahan bacaan					63 jenis	63 jenis	41.067.000	41.067.000	-			4 laporan	32.236.000		
	17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan					12 laporan	12 laporan	145.897.000	145.897.000	-			12 laporan	192.359.000		
	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah					12 laporan	12 laporan	129.894.750	77.780.000	52.114.750			4 laporan	160.000.000		
	19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung					12 laporan	12 laporan	494.260.000	494.260.000	-			12 laporan	636.000.000		
	20	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor					9 jasa bulanan	9 jasa bulanan	585.600.000	585.600.000	-			10 jasa bulanan	173.514.000		
	13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor					-	-	-	-	-			4 laporan	192.917.685		
4.05	26	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	OPD Kecamatan Kiaracondong	OPD Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	730.575.319	730.575.319	-	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	1.051.593.007	Sub Bag Kecamatan dan Sekrt Kelurahan
		07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor				-	-	-	-	-			7 jenis	58.982.973		
		10	Kegiatan pengadaan mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair				-	-	-	-	-			15 jenis	121.466.159		
		22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				27 jenis	27 jenis	105.132.319	105.132.319	-			25 jenis	238.296.850		
		24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan yang dikelola	Jumlah unit kendaraan yang dikelola				76 unit	76 unit	625.443.000	625.443.000	-			78 unit	619.035.280		
		42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah laporan rehabilitasi	Jumlah laporan rehabilitasi				-	-	-	-	-			1 gedung	13.811.745		



Kecamatan Kiaracondong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018														Prakiraan Maju Tahun 2019		PERANG KAT DAERAH Penanggung Jawab	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		sedang/berat gedung kantor	sedang/berat gedung kantor																
4.05	26	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	OPD Kecamatan Kiaracondong	OPD Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	240.476.400	240.476.400	-	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	4.042.500	Sub Bag Kecamatan dan Sekrt Kelurahan
		02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya						26 jenis	26 jenis	156.840.900	156.840.900				1 jenis	4.042.500	
		05	Kegiatan pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu						5 jenis	5 jenis	83.635.500	83.635.500	-			-	-	
4.05	26	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	OPD Kecamatan Kiaracondong	OPD Kecamatan Kiaracondong	Kota Bandung	Kota Bandung	-	-	-	-	-	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	95,50 %	60.000.000	Sub Bag Kecamatan dan Sekrt Kelurahan
		04	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur					-	-	-	-	-			1 paket	60.000.000	
TOTAL											19.707.175.743	19.655.060.993	52.114.750						



B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1) Sasaran strategis meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,11	85	86,71

Hasil kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 adalah sebesar 86,71 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 1,71 point yaitu 102,01 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata indeks kepuasan masyarakat dari Triwulan I s.d. Triwulan IV, pada unit pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kiaracondong diperoleh jumlah nilai rata-rata indeks komposit (gabungan) sebagai berikut :

No	Wilayah Pelayanan	Nilai Rata-rata SKM
1	Unit Kecamatan Kiaracondong	82,78
2	Kelurahan Babakan Sari	89,31
3	Kelurahan Babakan Surabaya	85,09
4	Kelurahan Kebon Kangkung	89,15
5	Kelurahan Sukapura	87,50
6	Kelurahan Cicaheum	86,05
7	Kelurahan Kebon Jayanti	87,06
	Rata-rata Indeks Komposit	86,71



Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3,38
2	Prosedur (U2)	3,36
3	Waktu Pelayanan (U3)	3,39
4	Biaya/Tarif (U4)	3,87
5	Produk Layanan (U5)	3,40
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,47
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,42
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)	3,36
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3,59

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : **150** orang

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi adalah Biaya/Tarif harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kategori tertinggi dan terendah hasil IKM tahun 2018 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

1. Nilai kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana.
2. Nilai kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.



Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Adanya media informasi yang jelas kepada masyarakat terhadap biaya yang akan dibebankan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat seperti spanduk, pamflet, koran/majalah dan media informasi lainnya.
3. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
4. Terpenuhinya sarana dan sarana yang memadai untuk kepentingan pelayanan publik yang prima.
5. Tersediannya ruang tunggu yang nyaman dimana masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan) sebagai berikut :

1. SPP (Standar Prosedur Pelayanan) belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Kiaracandong.
2. SOP (Standart Operasional Prosedur) yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, belum mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum dilakukannya secara maksimal tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan yang diterima dari



masyarakat, belum tersedianya petugas layanan khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.

Grafik 3.1.1

Perbandingan IKM Tahun 2017 dengan Tahun 2018



Perbandingan nilai unsur dengan nilai terendah dan nilai tertinggi di tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu :

1. Nilai terendah tahun 2017 pada nilai unsur kecepatan pelayanan, hal ini tidak terlepas karena permasalahan nasional yakni kosongnya blangko E-KTP sehingga pelayanan pembuatan KTP di tahun 2017 terhambat, hal ini ditindak lanjuti dengan sosialisasi dan pemberian informasi



kepada masyarakat bahwa keterlambatan pelayanan pembuatan KTP bukan karena faktor keterlambatan kinerja pelayanan di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan Kota Bandung tetapi karena belum turunnya blangko E-KTP dari tingkat pusat. Disamping itu juga dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa KTP yang sudah habis masa berlakunya dapat dijadikan identitas penduduk dengan masa berlakunya seumur hidup selama identitas penduduk tersebut tidak mengalami perubahan data penduduk, sedangkan yang belum menerima blangko KTP dapat dibuatkan Surat Keterangan (Suket) kepada masyarakat yang memerlukan keterangan identitas penduduk sebelum turunnya blangko E-KTP dari tingkat pusat.

Sedangkan nilai terendah tahun 2018 ada pada unsur prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, hal ini ditindak lanjuti dengan adanya ruangan khusus untuk pengaduan dimana masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang menyangkut dengan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan dan Kelurahan sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, disamping itu juga standar prosedur pelayanan akan segera dilaksanakan lebih baik lagi kedepan sehingga harapan masyarakat terhadap tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan *pelayanan publik* dapat tercapai dengan baik.

2. Nilai tertinggi tahun 2017 yaitu ada pada unsur Tanggungjawab Petugas Pelayanan dan Kemampuan Petugas Pelayanan, kondisi ini harus tetap dijaga dan dipertahankan atau bahkan perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan Tanggungjawab Petugas Pelayanan salah



satu faktor pendukungnya adalah bimbingan, arahan dan kepercayaan pimpinan terkait yang disampaikan pada saat apel pagi, sehingga Tanggungjawab Petugas Pelayanan semakin meningkat.

Sedangkan nilai tertinggi tahun 2018 ada pada unsur Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2018 ini dalam upaya meningkatkan Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana salah satu faktor pendukungnya adalah Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya, dan terpenuhinya sarana dan sarana yang memadai untuk kepentingan pelayanan publik yang prima.

Dengan nilai sasaran target yang sudah ditentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif diantaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM , sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.
3. Menentukan responden yang dapat mengisi kuisisioner secara obyektif , merupakan prioritas kami untuk mendapatkan nilai IKM yang obyektif.



Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi / rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan IKM yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan penyusunan program, rencana aksi dan penetapan anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan ketidakpuasan pelayanan.
2. Kegiatan IKM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 85 dengan realisasi capaian 86,71, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam RKPD Tahun 2018.

Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat



Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85. Realisasi (*inputs*) 86,71 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{86.71}{85} \times 100 \% = 102,01 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat.

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$= \frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100 \%$ $= \frac{86,71}{85,00} \times 100\%$ $= 102,01 \%$ Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)
	Terlaksananya Survey IKM	4 kali	4 kali	$= \frac{4 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} = 100 \%$
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$



Kecamatan Kiaracondong

Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan pemerintahan umum	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$



2) Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75 %	79,77 %	80 %	88,69 %

Hasil kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar 88,69 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya mengalami kenaikan sebesar 8,69 point yaitu 110,86 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80	88,69	110,86
Rata-rata Capaian Kinerja					110,86

Pencapaian hasil kinerja pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Kiaracundang dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracundang. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.



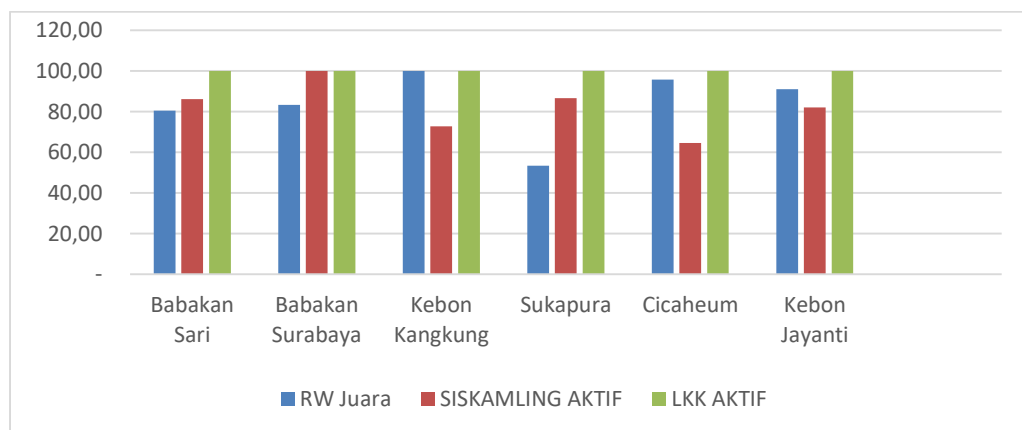
Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Kiaracondong selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
**Data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018**

Wilayah	Kriteria							TPLK
	RW Juara			Siskamling Aktif		LKK Aktif		
	Jumlah RW	Jumlah	Rata2 %	Jumlah	Rata2 %	Jumlah	Rata2 %	
Babakan Sari	18	15	80,56	16	86,11	3	100,00	88,89
Babakan Surabaya	15	12	83,33	15	100,00	3	100,00	94,44
Kebon Kangkung	11	11	100,00	8	72,73	3	100,00	90,91
Sukapura	15	8	53,33	13	86,67	3	100,00	80,00
Cicaheum	12	11	95,83	8	64,58	3	100,00	86,81
Kebon Jayanti	14	13	91,07	11	82,14	3	100,00	91,07
Jumlah	85	70	84,02	71	82,04	18	100,00	88,69

Sumber : Kecamatan Kiaracondong tahun 2018

Grafik 3.1.2
**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018**





Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Siskamling Aktif karena mempunyai posisi terendah pada survey TPLK yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada LKK Aktif yang harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil TPLK tahun 2018 di Kecamatan Kiaracondong yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu LKK Aktif.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada Siskamling Aktif.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Hampir seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan telah memenuhi kriteria LKK Aktif dimana seluruh LKK mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan).
2. LKK melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.
3. Minimal 60% Ketua/Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (Siskamling Aktif) sebagai berikut :

1. Masih adanya kriteria siskamling aktif yang ditetapkan belum dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan RW.
2. Belum meratanya pelaksanaan kelompok siskamling di lingkungan RW.



3. Belum sepenuhnya pelaksanaan jadwal siskamling atau ronda di lingkungan RW.
4. Masih adanya pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria Siskamling Aktif.

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2018 adalah sebesar 88,69 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2017 sebagai berikut :

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling tinggi ada pada kriteria Siskamling Aktif sedangkan pada tahun 2018 menjadi paling rendah, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur dengan kurangnya kegiatan siskamling atau ronda malam di masing-masing lingkungan RW. Hal ini perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur sehingga dapat terciptanya kembali suasana ketentraman dan ketertiban di masing-masing wilayah khususnya di kewilayahan Kecamatan Kiaracandong dan Kota Bandung pada umumnya.

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling rendah ada pada kriteria RW Juara sedangkan pada tahun 2018 kriteria RW Juara ada peningkatan, yang menjadi faktor pendukung meningkatnya kriteria RW Juara adalah dengan adanya keberhasilan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang menjadi program kerja dan kegiatan di masing-masing kewilayahan, dimana komponen kriteria RW Juara telah dimasukkan kedalam kegiatan yang menjadi sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat.



Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Pemahaman masyarakat tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sudah dilaksanakan di setiap RW/kampung.
2. Sosialisasi yang intensif dari Kelurahan dan Kecamatan tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terus dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Keberadaan masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan (Individualis).
2. Karakteristik warga masyarakat , jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan penyusunan program, rencana aksi dan penetapan anggaran untuk menjawab agar tingkat pemberdayaan masyarakat ke depan jauh lebih baik.



2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang program yang mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria penilaian kegiatan tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.
3. Kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 80 % dengan realisasi capaian 88,69%, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dengan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW, fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK, fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna, dan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM dalam RKPD Tahun 2018.



Program : PIPPK

Indikator : Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 80 %. Realisasi (*inputs*) 88,69 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{88,69\%}{80,00\%} \times 100 \% = 110,86 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian hasil kinerja pada indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari 3(tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kiaracandong dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Kiaracandong. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.

Kegiatan : 1. Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 255 sub kegiatan. Realisasi (*inputs*) 234 sub kegiatan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{234}{255} \times 100 \% = 91,76\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai pemberdayaan lingkup RW di Kecamatan Kiaracandong Tahun Anggaran 2018.

Analisis kegiatan pemberdayaan lingkup RW ialah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing RW di 6(enam) Kelurahan dengan menggunakan parameter 5(lima) sub kegiatan diantaranya :

- a. Penguatan kelembagaan
- b. Fisik dan infrastruktur



- c. Ekonomi, sosial dan budaya
- d. Keamanan dan ketertiban
- e. Kebersihan dan penghijauan

Realisasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Lingkup RW 234 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan	Sub kegiatan PIPPK RW				
	Penguatan kelembagaan	Fisik & Infrastruktur	Ekonomi, sosial & budaya	Keamanan & ketertiban	Kebersihan & penghijauan
Babakan Sari	28	26	-	-	-
Babakan Surabaya	6	15	10	4	10
Cicaheum	3	17	-	12	-
Kebon Jayanti	14	20	1	1	6
Kebon Kangkung	7	6	10	-	-
Sukapura	12	26	-	-	-
Jumlah	70	110	21	17	16

Sumber : Kecamatan Kiaracondong 2018

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Babakan Sari = 54 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Sari = 54 sub kegiatan	$= \frac{54 \text{ sub keg}}{54 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 45 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Surabaya = 45 sub kegiatan	$= \frac{45 \text{ sub keg}}{45 \text{ sub keg}} = 100 \%$



Kecamatan Kiaracondong

		Kelurahan Cicaheum = 36 sub kegiatan	Kelurahan Cicaheum = 32 sub kegiatan	$= \frac{32 \text{ sub keg}}{36 \text{ sub keg}} = 89 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 42 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Jayanti = 42 sub kegiatan	$= \frac{42 \text{ sub keg}}{42 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 33 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Kangkung = 23 sub kegiatan	$= \frac{23 \text{ sub keg}}{33 \text{ sub keg}} = 70 \%$
		Kelurahan Sukapura = 45 sub kegiatan	Kelurahan Sukapura = 38 sub kegiatan	$= \frac{38 \text{ sub keg}}{45 \text{ sub keg}} = 84 \%$



Kegiatan : 2. Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 24 sub kegiatan. Realisasi (*inputs*) 21 sub kegiatan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{21}{24} \times 100\% = 87,50\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai pemberdayaan lingkup PKK di Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2018.

Analisis kegiatan pemberdayaan lingkup PKK ialah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PKK di 6(enam) Kelurahan dalam pemberdayaan dan pembinaan di wilayah masing-masing dengan menggunakan parameter 4(empat) sub kegiatan diantaranya :

- a. Pokja I (P4, Keagamaan dan Gotong Royong)
- b. Pokja II (Pendidikan dan Pelatihan, dan Kehidupan Berkoperasi)
- c. Pokja III (Sandang, Pangan, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga)
- d. Pokja IV (Kesehatan dan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat)

Realisasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Lingkup PKK 21 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan	Sub kegiatan PIPPK PKK			
	Pokja I (P4, Keagamaan dan Gotong Royong)	Pokja II (Pendidikan dan Pelatihan, dan Kehidupan Berkoperasi)	Pokja III (Sandang, Pangan, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga)	Pokja IV (Kesehatan dan LH dan Perencanaan Sehat)
Babakan Sari	-	2	1	1



Kecamatan Kiaracondong

Babakan Surabaya	2	-	-	2
Cicaheum	1	-	-	1
Kebon Jayanti	1	1	-	1
Kebon Kangkung	-	-	1	3
Sukapura	1	1	1	1
Jumlah	5	4	3	9

Sumber : Kecamatan Kiaracondong 2018

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Babakan Sari = 4 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Sari = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 4 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Surabaya = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 4 sub kegiatan	Kelurahan Cicaheum = 2 sub kegiatan	$= \frac{2 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 50 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 4 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Jayanti = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 75 \%$



Kecamatan Kiaracondong

		Kelurahan Kebon Kangkung = 4 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Kangkung = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Sukapura = 4 sub kegiatan	Kelurahan Sukapura = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$



Kegiatan : 3. Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 24 sub kegiatan. Realisasi (*inputs*) 22 sub kegiatan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{22}{24} \times 100\% = 91,67\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai pemberdayaan lingkup Karang Taruna di Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2018.

Analisis kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna ialah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna di 6(enam) Kelurahan dalam pemberdayaan dan pembinaan di wilayah masing-masing dengan menggunakan parameter 5(lima) sub kegiatan diantaranya :

- a. Kesekretariatan
- b. Pelatihan Keterampilan
- c. Perlombaan Olahraga
- d. Pengabdian Masyarakat
- e. Kesenian

Realisasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Lingkup PKK 22 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan	Sub kegiatan PIPPK Karang Taruna				
	Kesekretariatan	Pelatihan keterampilan	Perlombaan Olah Raga	Pengabdian Masyarakat	Kesenian
Babakan Sari	1	1	1	1	
Babakan Surabaya	1	1	1		
Cicaheum	1	1	1		
Kebon Jayanti	1	1	1	1	



Kecamatan Kiaracondong

Kebon Kangkung	2	1		1	
Sukapura	1	1	1		1
Jumlah	7	6	5	3	1

Sumber : Kecamatan Kiaracondong 2018

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Babakan Sari = 4 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Sari = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 4 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Surabaya = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 75 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 4 sub kegiatan	Kelurahan Cicaheum = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 75 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 4 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Jayanti = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 4 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Kangkung = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$



Kecamatan Kiaracondong

		Kelurahan Sukapura = 4 sub kegiatan	Kelurahan Sukapura = 4 sub kegiatan	$= \frac{4 \text{ sub keg}}{4 \text{ sub keg}} = 100 \%$
--	--	--	--	--



Kegiatan : 4. Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 18 sub kegiatan. Realisasi (*inputs*) 17 sub kegiatan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{17}{18} \times 100\% = 94,44\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai pemberdayaan lingkup LPM di Kecamatan Kiaracondong Tahun Anggaran 2018.

Analisis kegiatan pemberdayaan lingkup LPM ialah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh LPM di 6(enam) Kelurahan dalam pemberdayaan dan pembinaan di wilayah masing-masing dengan menggunakan parameter 3(tiga) sub kegiatan diantaranya :

- a. Perencanaan
- b. Bulan Bakti Gotong Royong
- c. Monev Kewilayahan

Realisasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Lingkup LPM 17 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan	Sub kegiatan PIPPK LPM		
	Perencanaan	BBGR	Monev kewilayahan
Babakan Sari	2	1	
Babakan Surabaya	2	1	
Cicaheum	1	1	1
Kebon Jayanti	1	1	



Kecamatan Kiaracondong

Kebon Kangkung	1	1	1
Sukapura	1	1	1
Jumlah	8	6	3

Sumber : Kecamatan Kiaracondong 2018

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Babakan Sari = 3 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Sari = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Babakan Surabaya = 3 sub kegiatan	Kelurahan Babakan Surabaya = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cicaheum = 3 sub kegiatan	Kelurahan Cicaheum = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Kebon Jayanti = 3 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Jayanti = 2 sub kegiatan	$= \frac{2 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 67 \%$
		Kelurahan Kebon Kangkung = 3 sub kegiatan	Kelurahan Kebon Kangkung = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 100 \%$



		Kelurahan Sukapura = 3 sub kegiatan	Kelurahan Sukapura = 3 sub kegiatan	$= \frac{3 \text{ sub keg}}{3 \text{ sub keg}} = 100 \%$
--	--	--	--	--

Program/Kegiatan Fungsi Penunjang Lainnya

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 85 dengan realisasi capaian 86,71, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan fungsi penunjang lainnya yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur dalam RKPD Tahun 2018.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85. Realisasi (*inputs*) 86,71 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{86.71}{85} \times 100 \% = 102,01 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat.



NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$\frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100 \%$ $= \frac{86,71}{85,00} \times 100\%$ $= 102,01 \%$ <p>Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)</p>
	Terlaksananya Survey IKM	4 kali	4 kali	$= \frac{4 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik terealisasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	$= \frac{12 \text{ jasa bulanan}}{12 \text{ jasa bulanan}} = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit jasa perijinan kendaraan yang dikelola terealisasi	76 unit	53 unit	$= \frac{53 \text{ unit}}{76 \text{ unit}} = 69,74 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	$= \frac{12 \text{ jasa bulanan}}{12 \text{ jasa bulanan}} = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja terealisasi	59 unit	46 unit	$= \frac{46 \text{ unit}}{59 \text{ unit}} = 77,97 \%$
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor terealisasi	6 paket	4 paket	$= \frac{4 \text{ paket}}{6 \text{ paket}} = 66,67 \%$
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan terealisasi	80 jenis	67 jenis	$= \frac{67 \text{ jenis}}{80 \text{ jenis}} = 83,75 \%$
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan terealisasi	34 jenis	29 jenis	$= \frac{29 \text{ jenis}}{34 \text{ jenis}} = 85,29 \%$
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga terealisasi	94 jenis	75 jenis	$= \frac{75 \text{ jenis}}{94 \text{ jenis}} = 79,79 \%$



Kecamatan Kiaracondong

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang terealisasi	63 jenis	48 jenis	$= \frac{48 \text{ jenis}}{63 \text{ jenis}} = 76,19 \%$
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	12 laporan	12 laporan	$= \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} = 100 \%$
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	9 jasa bulanan	9 jasa bulanan	$= \frac{9 \text{ jasa bulanan}}{9 \text{ jasa bulanan}} = 100 \%$



Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85. Realisasi (*inputs*) 86,71 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{86.71}{85} \times 100\% = 102,01\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat.

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$\frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100\%$ $= \frac{86,71}{85,00} \times 100\%$ $= 102,01\%$ <p>Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)</p>
	Terlaksananya Survey IKM	4 kali	4 kali	$= \frac{4 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} = 100\%$
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor terpelihara	27 jenis	26 jenis	$= \frac{26 \text{ jenis}}{27 \text{ jenis}} = 97,70\%$
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan yang dikelola terealisasi	76 unit	64 unit	$= \frac{64 \text{ unit}}{76 \text{ unit}} = 84,21\%$



Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85. Realisasi (*inputs*) 86,71 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{86.71}{85} \times 100 \% = 102,01 \%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat.

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$\frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100 \%$ $= \frac{86,71}{85,00} \times 100\%$ $= 102,01 \%$ <p>Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)</p>
	Terlaksananya Survey IKM	4 kali	4 kali	$= \frac{4 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} = 100 \%$
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya terealisasi	26 jenis	25 jenis	$= \frac{25 \text{ jenis}}{26 \text{ jenis}} = 96,15 \%$
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang terealisasi	5 jenis	5 jenis	$= \frac{5 \text{ jenis}}{5 \text{ jenis}} = 100 \%$



Sasaran Program

Keberhasilan Kecamatan Kiaracondong dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan *e-database*, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2018.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,11	85	86,71
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75 %	79,77 %	80 %	88,69 %



Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2018.

Pada sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat terdapat 4 kegiatan capaiannya tidak sesuai target, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.		
	a. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW.		
	b. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK.		
	c. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna.		
	d. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM.		
	Permasalahan	:	<ul style="list-style-type: none">- Adanya kegiatan infrastruktur di program kegiatan PIPPK yang tidak sesuai dengan rencana awal dengan kondisi dilapangan yang akan dikerjakan sehingga diperlukan perubahan dan pergeseran di DPA murni.- Komunikasi antara pejabat PPTK dengan warga masyarakat/LKK sebagai penerima manfaat di kegiatan PIPPK belum berjalan secara maksimal sehingga pelaksanaan kegiatan tersendat.
	Penyelesaian	:	<ul style="list-style-type: none">- Telah mengajukan usulan perubahan dan pergeseran anggaran di DPA Perubahan agar kegiatan dapat segera diakomodir dan dilaksanakan, serta kedepannya agar perencanaan awal kegiatan harus disusun dan dilakukan secara cermat agar supaya permasalahan dapat tereleminir dan tidak menjadi hambatan dikemudian



		<p>hari.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menginstruksikan kepada para PPTK di Kelurahan agar dapat segera melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan dengan warga masyarakat atau penerima manfaat pada kegiatan PIPPK, komunikasi yang intens dan baik dengan warga masyarakat maka diharapkan segala permasalahan yang terjadi dapat segera dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
--	--	--

Pada sasaran program meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terdapat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 7(tujuh) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2(dua) kegiatan, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1(satu) kegiatan yang pencapaiannya tidak sesuai dengan target, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1.	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.b. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.c. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.f. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.g. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
----	--



2.	<p>undangan.</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> <p>a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor.</p> <p>b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.</p>
3.	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur.</p> <p>a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</p>
Permasalahan	: <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan kurang maksimal sehingga berdampak terhadap perlambatan pelaksanaan kegiatan.
Penyelesaian	: <ul style="list-style-type: none">- Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan agar segera melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan dapat dilakukan secara intensif sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.



C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2018, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 49 orang Aparatur Sipil Negara dan 15 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan sebesar 84,56 % dan realisasi fisik 87,16 %.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2018. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD : Rp **32.464.681.309,-**

Alokasi anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar Rp.**32.464.681.309,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.12.809.620.316,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.19.655.060.993,-



Belanja Langsung Urusan terdiri atas:

# Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	3.339.706.996,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	16.315.353.997,-
Jumlah	: Rp	19.655.060.993,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebesar **Rp.28.196.246.024,-** Yang terdiri atas:

# Belanja Tidak Langsung	: Rp	11.576.625.244,-
# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	2.654.420.870,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	13.965.199.910,-
Jumlah	: Rp	28.196.246.024,-



Tabel 3.4

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Tahun 2018

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	JUMLAH	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	8.530.249.162	8.530.249.162	7.306.241.130	85,65
	1. Kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan		64.215.200	22.229.100	34,62
	2. Kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan		1.158.150.000	960.307.050	82,92
	3. Kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan		3.264.249.858	2.785.140.260	85,32
	4. Kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan		665.007.440	591.225.500	88,91
	5. Kegiatan fasilitasi peningkatan pemerintah umum Kecamatan dan Kelurahan		2.942.329.509	2.663.586.250	90,53
	6. Kegiatan fasilitasi peningkatan kepada masyarakat		51.107.000	34.445.000	67,40
	7. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat		385.190.155	249.307.970	64,72
2.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	7.785.104.835	7.785.104.835	6.658.958.780	85,53
	1. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW		6.357.639.485	5.493.106.355	86,40
	2. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK		395.787.750	310.420.150	78,43
	3. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna		577.389.000	487.912.425	84,50
	4. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM		454.288.600	367.519.850	80,90
	Program Pelayanan Administrasi	2.368.655.277	2.368.655.277	1.842.109.770	77,77



<p>3.</p>	<p>Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11. Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah 12. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran 13. Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor 		<p>308.834.974</p> <p>19.321.930</p> <p>347.047.400</p> <p>26.828.000</p> <p>111.368.181</p> <p>163.252.538</p> <p>23.503.254</p> <p>23.895.000</p> <p>41.067.000</p> <p>145.897.000</p> <p>77.780.000</p> <p>494.260.000</p> <p>585.600.000</p>	<p>122.349.915</p> <p>12.228.000</p> <p>298.177.050</p> <p>21.911.250</p> <p>85.924.340</p> <p>121.159.010</p> <p>20.050.350</p> <p>20.149.800</p> <p>28.408.000</p> <p>91.220.625</p> <p>53.863.330</p> <p>482.302.500</p> <p>484.365.600</p>	<p>39,62</p> <p>63,29</p> <p>85,92</p> <p>81,67</p> <p>77,15</p> <p>74,22</p> <p>85,31</p> <p>84,33</p> <p>69,17</p> <p>62,52</p> <p>69,25</p> <p>97,58</p> <p>82,71</p>
<p>4.</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas / Operasional 	<p>730.575.319</p>	<p>730.575.319</p> <p>105.132.319</p> <p>625.443.000</p>	<p>593.362.150</p> <p>102.711.100</p> <p>490.651.050</p>	<p>81,22</p> <p>97,70</p> <p>78,45</p>
<p>5.</p>	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 	<p>240.476.400</p>	<p>240.476.400</p> <p>156.840.900</p> <p>83.635.500</p>	<p>218.948.950</p> <p>136.237.750</p> <p>82.711.200</p>	<p>91,05</p> <p>86,86</p> <p>98,89</p>

KECAMATAN KIARACONDONG

PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Simpulan Capaian Kinerja
- C. Rencana Tindak



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2018.

A. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung dilakukan sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung



sebagai Kota Jasa yang Bermatahat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara” dan Kecamatan Kiaracondong berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi Kecamatan Kota Bandung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 **“MEWUJUDKAN KECAMATAN KIARACONDONG TERMAJU DALAM PELAYANAN MELALUI PENINGKATAN KINERJA APARATUR YANG PROFESIONAL”**. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mendekati target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar Rp. **32.464.681.309,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 12.809.620.316,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 19.655.060.993,-. Seluruh kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 84,56 % dan realisasi fisik Kegiatan 87,16 %.

C. Rencana Tindak

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan masyarakat umum



perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, "Bandung Juara".

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kiaracundang Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 04 Januari 2019
Kecamatan Kiaracundang
KECAMATAN
KIARACUNDANG
Drs. TARYA
Pembina TK.I
NIP. 19660622 198703 1 004